



**RENCANA KERJA  
SEKRETARIAT DPRD  
KOTA BEKASI  
2023**

**Jl. Chairil Anwar No. 112 Telp. (021) 88355762**

**KOTA BEKASI**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunianya, Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan. Rencana Kerja yang disusun oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun 2021. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi diharapkan dapat memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan VISI dan MISI serta arahan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga seluruh daya dan upaya yang akan dilakukan dapat berjalan secara sinergis dalam satu pola sikap dan tindak.

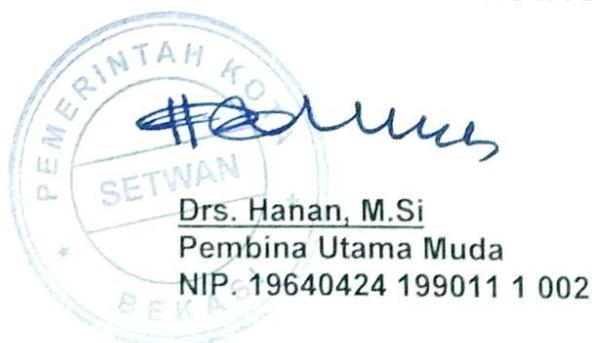
Rencana Kerja (RENJA) juga merupakan sebagai landasan operasional penyusun program dan kegiatan prioritas pada Tahun 2023 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi pada Tahun 2021.

Kepada semua pihak yang telah mengerahkan tenaga dan pikirannya dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 ini kami sampaikan ucapan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan memberkahi langkah serta upaya kita dalam meningkatkan kinerja guna mewujudkan “**Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan**”.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 2022

SEKRETARIS DPRD KOTA BEKASI



Drs. Hanan, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640424 199011 1 002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1      Latar Belakang	1
1.2      Landasan Hukum	2
1.3      Maksud dan Tujuan	4
1.4      Sistematika Penulisan	5
<b>BAB II    HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI           TAHUN 2021</b>	<b>9</b>
2.1      Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2021 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi	9
2.2      Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi	12
<b>BAB III   TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI</b>	<b>17</b>
3.1      Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	17
3.2      Telaahan Visi Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih Tahun 2018-2023	19
3.3      Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi	29
<b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA           BEKASI</b>	<b>34</b>
4.1      Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi	34
<b>BAB V    PENUTUP</b>	<b>63</b>
Penutup	63

## BAB I PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) mengamanatkan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai Rencana Tahunan. Dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Wali kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi. RKPD Kota Bekasi Tahun 2021 berfungsi sebagai dokumen Perencanaan Tahunan dan penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang Tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan RENJA Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut, maka Sekretariat DPRD Kota Bekasi sebagai Perangkat Daerah pada Tahun 2022 menyusun Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023.

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 dibuat berdasarkan RENSTRA Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja (RENJA ) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat di selesaikan dan memuat Program/ Kegiatan Prioritas Pembangunan yang akan di laksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun berjalan.

Rencana Kerja (RENJA ) Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun

2023 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh Aparat Sekretariat DPRD Kota Bekasi untuk melaksanakan tugasnya menjalankan Program dan Kegiatannya guna mencapai target Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya di dalam Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA Perubahan) dan dapat tercapai dengan baik serta diharapkan pula dapat terpantau dan terevaluasi sejauh mana pencapaian Tujuan dan Sasaran dari tahun ke tahun sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi perkembangan baru dilingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan proses penetapan Kegiatan Tahunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD dan Indikator Kinerja berdasarkan Program Kebijakan dan Sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RENSTRA Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dan menentukan target yang realistis, oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk Jangka Pendek sebagai pedoman dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta langkah-langkah Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, sehingga capaian target apa saja yang belum tercapai pada tahun 2013-2018.

## **I.2. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
  8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 3 Seri E);
  9. Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi 2018-2023 (Berita

- Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 43 Seri E);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 52 Seri D);
  11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 54 Seri E).

### **I.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA ) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 adalah untuk mengetahui:

1. Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023.
2. Lokasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023.
3. Indikator Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023.
4. Kelompok Sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Pagu indikatif Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA ) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023.
2. Mengevaluasi Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun sebelumnya.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun sebelumnya.
4. Perumusan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023.

5. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

#### **I.4. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja (RENJA ) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **I.1. Latar belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023, proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA ), keterkaitan antara RENJA Sekretariat DPRD dengan dokumen RKPD, RENSTRA Perubahan Sekretariat DPRD, dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### **I.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan tujuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

##### **I.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA ) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023.

##### **I.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja (RENJA ) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 serta susunan garis besar isi dokumen.

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

##### **II.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun**

Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun tahun sebelumnya.

## II.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

## II.3. Isu-isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang lalu.

## II.4. Review terhadap Rancangan RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan

RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat do0 rancangan RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbentuk Lampiran table.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### III.2. Telaahan Visi dan Misi serta Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih 2018-2023

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah, Sekretariat DPRD Kota Bekasi melaksanakan Misi ke-1 **“Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”**.

#### III.3. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target Renstra Perangkat Daerah.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI**

Berisikan penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu Indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan (misal : pencapaian visi dan misi kepala daerah);

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain : jumlah program, dan jumlah kegiatan, sifat penyebaran lokasi lokasi program dan kegiatan dan total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan;
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya;
4. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33.

## **BAB V PENUTUP**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**  
**SKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI TAHUN 2021**

**II.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2021 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi**

Untuk mencapai keberhasilan RPJMD maka dapat kita dilihat dari capaian indikator yang ada pada RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang terdapat pada tabel berikut ini :

**EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**  
**SKPD SEKRETARIAT DPRD KOTA PADA RPJMD**  
**MURNI 2018-2023**

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	76,61	76,71	-	-	-	76,78	76,98	-	-	-
	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	Persen (%)	50	50	-	-	-	100	100	-	-	-
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76,61	76,71	-	-	-	82,46	84,71	-	-	-

**EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA  
SKPD SEKRETARIAT DPRD KOTA PADA RPJMD  
Perubahan 2018-2023**

NO	INDIKATOR SASARAN	IKU	TARGET RENSTRA SKPD (%)					REALISASI CAPAIAN (%)				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	Persen (%)	-	-	75	75.10	75.20	-	-	87,51		
	Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	Persen (%)	-	-	75	75,1	75,2	-	-	100		
	Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	Persen (%)	-	-	75	75,1	75,2	-	-	100		
	Nilai Perangkat Daerah AKIP	Nilai	-	-	77,4	77,5	77,6	-	-	69,56		

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam jangka waktu 5 tahun yang dijabarkan dalam kegiatan tahunan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam rangka mencapai misi organisasi.

Kinerja yang telah dicapai pemerintah Kota Bekasi berupa pencapaian sasaran yang menjadi tanggung-jawab Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja terutama target tahun 2021 sebanyak 4 (tiga) buah sasaran. Dengan rincian sebagai berikut :

**A. Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu**

Perhitungan IKU untuk “Prosentase Raperda yang

disahkan menjadi Perda tepat waktu ”dilakukan melalui: Jumlah Raperda yang diusulkan baik itu dari OPD teknis terkait maupun dari aspirasi DPRD di bagi Perda yang disahkan tepat waktu di kali 100 % dan sudah di Paripurnakan. Dan di buat laporannya dalam bentuk Daftar Raperda yang sudah di Paripurnakan.

Berdasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah Kota Bekasi Terpilih 2018-2023, maka Sekretariat DPRD Kota Bekasi akan mendukung pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih terutama di Misi Pertama yaitu: **“Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik”** sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Kepala Daerah Kota Bekasi.

#### **B. Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu**

Perhitungan IKU untuk “Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu” dilakukan sesuai dengan Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dimana Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi, paling lambat akhir November.

#### **C. Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu**

Perhitungan IKU untuk “Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu” dilakukan sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan

setelah tahun anggaran berakhir.

#### D. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Perhitungan nilai AKIP terdiri dari Nilai Komponen Perencanaan kinerja + Nilai Komponen Pengukuran Kinerja + Nilai Komponen Pelaporan Kinerja + Nilai Komponen Evaluasi Internal + Nilai Komponen Capaian Kinerja.

## II.2. Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi

### Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020
			Target	Realisasi	
1	Prosentase Raperda yang difinalisasikan menjadi Perda tepat waktu	Indeks	75%	87,51%	116,68%

Sumber : Data Olahan Bagian Program dan Keuangan, Setwan, 2021

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target penyelesaian Raperda TA 2021 yang disahkan menjadi Perda tepat waktu sejumlah 16 Perda. Dalam perjalanan target awal pembahasan Raperda di TA 2021 sejumlah 15 Raperda. Namun di bulan Oktober terdapat usulan judul Raperda sehingga target pembahasan Raperda di TA 2021 menjadi 16 Judul.

Pansus yang bertugas menyelesaikan pembahasan ini sudah menyelesaikan 14 judul Raperda sedangkan 2 Raperda tersisa sudah masuk tahap pembahasan dan direncanakan diselesaikan selambatnya pada bulan Februari TA 2022.

Rumusan dalam menghitung capaian tersebut sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perda yang disahkan}}{\text{Raperda yang diusulkan}} \times 100\%$$

Target Penyelesaian: 16 judul Raperda

Realisasi: 14 judul Raperda

Perhitungan:  $\frac{14}{16} \times 100\% = 87,51\%$

Realisasi penyelesaian melampaui dari target sejumlah 12,51% dengan tingkat capaian sebesar 116,68%

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Adanya perubahan pola pikir (*mindset*) dari DPRD Kota Bekasi representasi pelaksanaan Pendalaman Tugas DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi sehingga meningkatnya pemahaman DPRD terhadap tugas dan fungsinya.
- b. Sinergitas yang baik antara DPRD Kota Bekasi dengan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam memfasilitasi seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

#### **Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu**

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2020
2	Prosentase Pengesahan Anggaran	Persen	100%	100%	133,33%

Sumber : Data Olahan Bagian FPP Setwan, 2021

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target penyelesaian pengesahan anggaran TA 2021 tepat waktu sejumlah 100%.

Rumusan dalam menghitung capaian tersebut sebagai berikut:

$\frac{\text{Pengesahan APBD}}{\text{Pengesahan APBD dan LP2APBD}} \times 100\%$

Target Penyelesaian: 2 Raperda

Realisasi: 2 Raperda

Perhitungan:  $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$

Realisasi penyelesaian sesuai dengan target dengan tingkat capaian sebesar 100%

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Adanya komitmen DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait penyampaian, pembahasan dan pengesahan Raperda yang ada.

#### **Analisis Pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu**

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2020
3	Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	Persen	100%	100%	133,33%

Sumber : Data Olahan Bagian FPP Setwan, 2021

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target penyelesaian pembahasan LKPJ Kepala Daerah TA 2021 tepat waktu sejumlah 100%.

Rumusan dalam menghitung capaian tersebut sebagai berikut:

$\frac{\text{Pembahasan LKPJ}}{\text{Rekomendasi LKPJ oleh DPRD diserahkan tepat waktu}} \times 100\%$

Target Penyelesaian: 1 LKPJ

Realisasi: 1 Dokumen Rekomendasi LKPJ

Perhitungan:  $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$

Realisasi penyelesaian sesuai dengan target dengan tingkat capaian sebesar 100%

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Adanya komitmen DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait penyampaian, pembahasan dan pengesahan Raperda yang ada.

#### **Analisis Nilai AKIP Perangkat Daerah**

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2020
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,4	69,56	89,87%

Sumber : Data Olahan Bagian FPP Setwan, 2021

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa realisasi nilai AKIP Perangkat Daerah 69,56 dari target nilai 77,4 dengan tingkat capaian 89,87%.

Rumusan dalam menghitung Nilai AKIP sebagai berikut:

Nilai Komponen Perencanaan kinerja + Nilai Komponen Pengukuran Kinerja + Nilai Komponen Pelaporan Kinerja + Nilai Komponen Evaluasi Internal + Nilai Komponen Capaian Kinerja Target

Perhitungan:  $25,86 + 17,50 + 11,59 + 8,02 + 6,58 = 69,56$

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2021 dipengaruhi oleh komitmen dan sinergitas dari seluruh Aparatur di lingkup Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA

#### III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perlu adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antarwaktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus selaras mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Pentingnya keselarasan atau sinkronisasi antara daerah dan tingkat nasional (pusat) karena pencapaian pembangunan nasional merupakan hasil agregat pencapaian berbagai daerah secara berjenjang dari mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Dengan kata lain, target pembangunan nasional mustahil tercapai apabila program pembangunan di daerah tidak sinkron atau tidak mendukung program pembangunan nasional. Dalam rangka pencapaian pembangunan tersebut diperlukan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan untuk memantapkan keterikatan antar tingkatan pemerintah dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

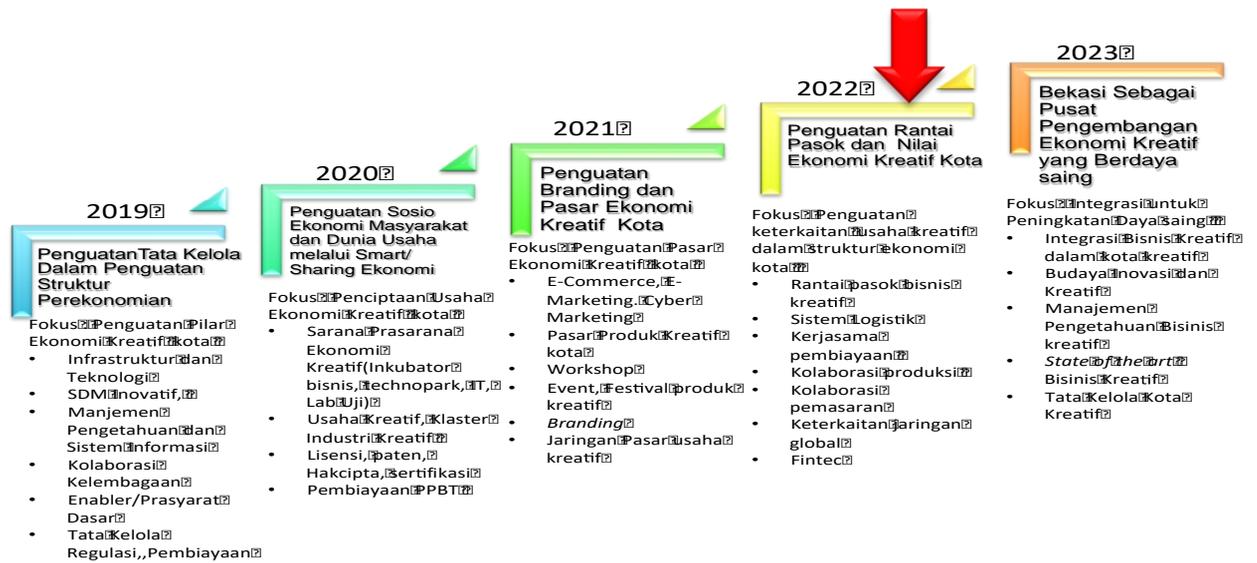
Sehubungan hal tersebut, perlu dilakukan telaahan baik terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat (Nasional) maupun juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Di samping itu, perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat juga harus menjadi acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi. Maka, perlu dilakukan telaahan juga terhadap kebijakan provinsi yaitu penelaahan terhadap arah kebijakan, tema dan prioritas pembangunan daerah yang tertuang di dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. Berikut tema dan prioritas

pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

Dengan demikian, kebijakan nasional dan provinsi tersebut menjadi acuan bagi Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu menyusun rumusan arah dan tema prioritas pembangunan daerah Kota Bekasi. Berikut tema dan prioritas pembangunan Kota Bekasi yang dituangkan dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2018-2023.

**Tema Dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021**



**Tahapan Tema Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2021-2023**

Berdasarkan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2020-2023 tersebut tema pembangunan dan fokus prioritas pembangunan Kota Bekasi tahun 2023 yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023 adalah “**Konsolidasi Ketercapaian Hasil Pembangunan**”. Fokus prioritasnya terbagi ke dalam 4 (empat) pilar dan 1 (satu) enabler sebagaimana dalam bagan berikut:



**Tahapan Pembangunan Kota Bekasi 2018-2023**

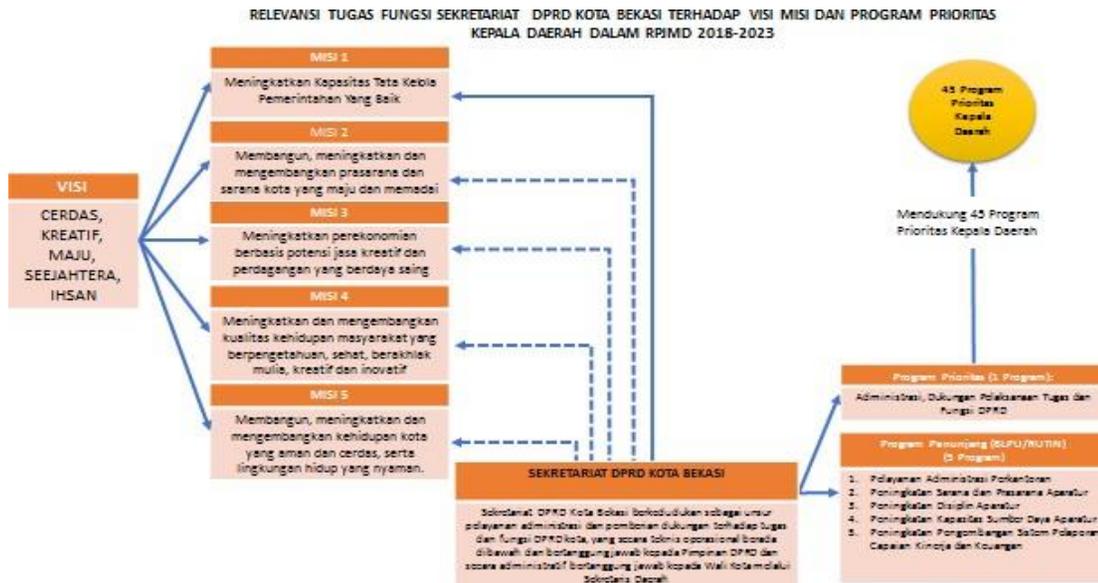
### III.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode tahun 2018-2023 adalah **“Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan”**. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi RPJMD Kota Bekasi 2018 - 2023, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai.
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif.
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Ditinjau dari misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode tahun 2018-2023, misi yang memiliki keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD adalah misi ke-1 yaitu **“meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik”**.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam Tugas pokok Sekretariat DPRD Kota Bekasi yaitu menyelenggarakan pelayanan administrasi memberikan Pelayanan serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode Tahun 2018-2023 yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD), serta dijabarkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).



Dengan demikian, untuk mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode tahun 2018-2023 tersebut, Sekretariat DPRD melaksanakan program dan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD melalui Renstra Perubahan Tahun 2021-2023 sampai dengan ditetapkan RPJMD Kota Bekasi melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi.

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode tahun 2018-2023 diidentifikasi faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BEKASI TERPILIH PERIODE TAHUN 2018-2023**

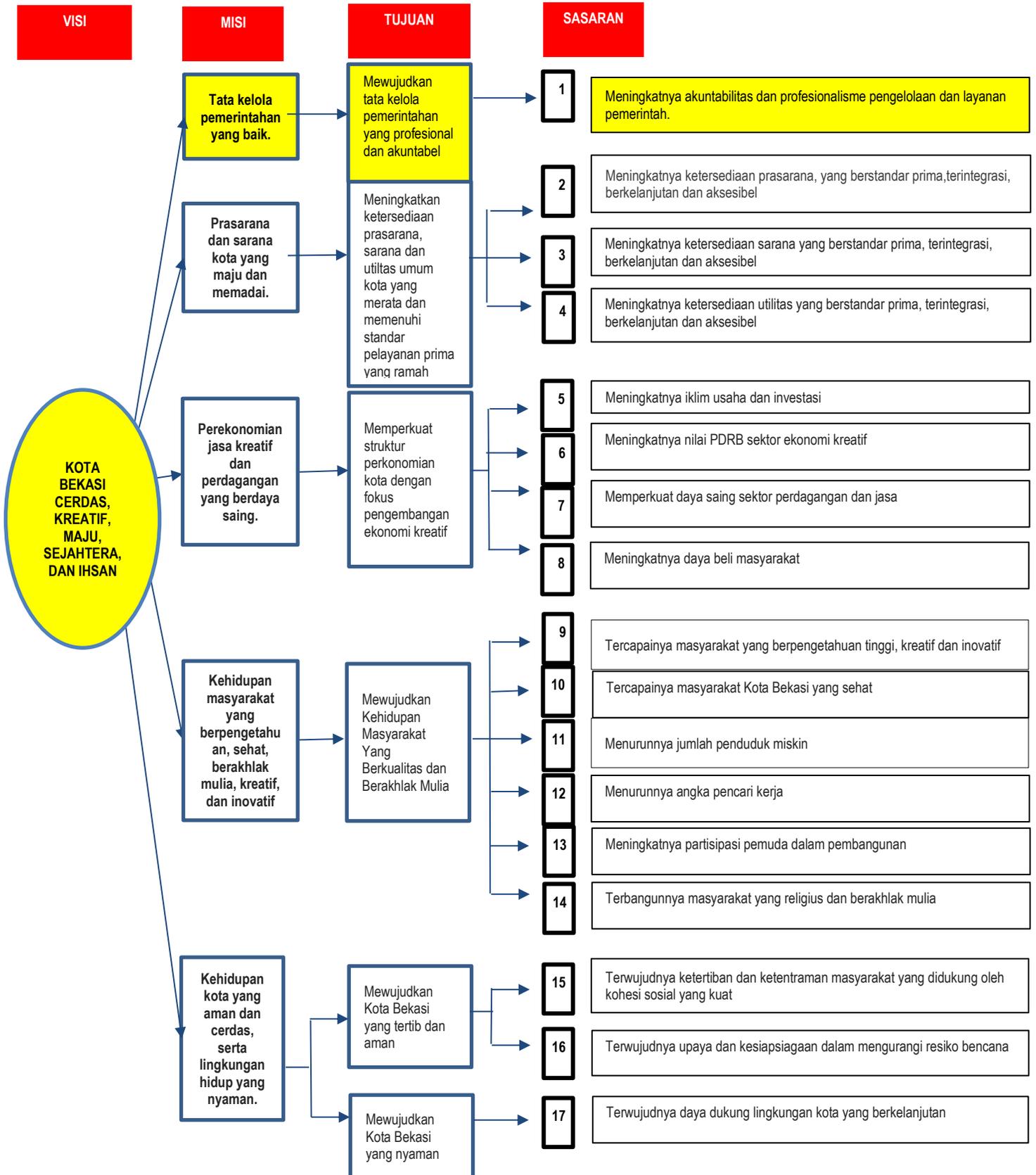
<b>Visi: Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan</b>				
No.	Misi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintah	Terlambatnya penetapan peraturan perundangan terkait dokumen perencanaan dan penganggaran usulan	Perangkat Daerah pengusul dokumen terlambat dalam	Adanya regulasi terkait penetapan peraturan

han yang baik	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	mengajukan usulan untuk pembahasan	perundangan
	Terlambatnya penetapan peraturan perundangan atas usulan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	Perangkat Daerah pengusul raperda terlambat dalam mengajukan usulan untuk pembahasan	Adanya regulasi terkait penetapan peraturan perundangan
	Tidak sesuai nya jadwal persidangan dengan jadwal yang telah ditetapkan	Beberapa anggota DPRD belum seluruhnya mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan	Adanya regulasi terkait penetapan peraturan perundangan

Misi merupakan langkah utama yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai Visi Kota Bekasi. Sebagai sebuah lembaga pemerintahan yang memegang fungsi dan peran penting bagi Penghubung antara DPRD Kota Bekasi dengan Pemerintah Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi harus mampu menjadi sebuah lembaga pemerintahan yang terkelola dengan baik. Baik dari sisi pemberdayaan sumber daya internal dan pemanfaatan fasilitas dan kewenangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sekretariat DPRD Kota Bekasi juga harus mampu melakukan perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran sehingga tujuan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam RPJMD dapat tercapai, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi adalah **“Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan”**. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, dilaksanakan misi yang terdiri dari:

URAIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN RPJMD 2018-2023



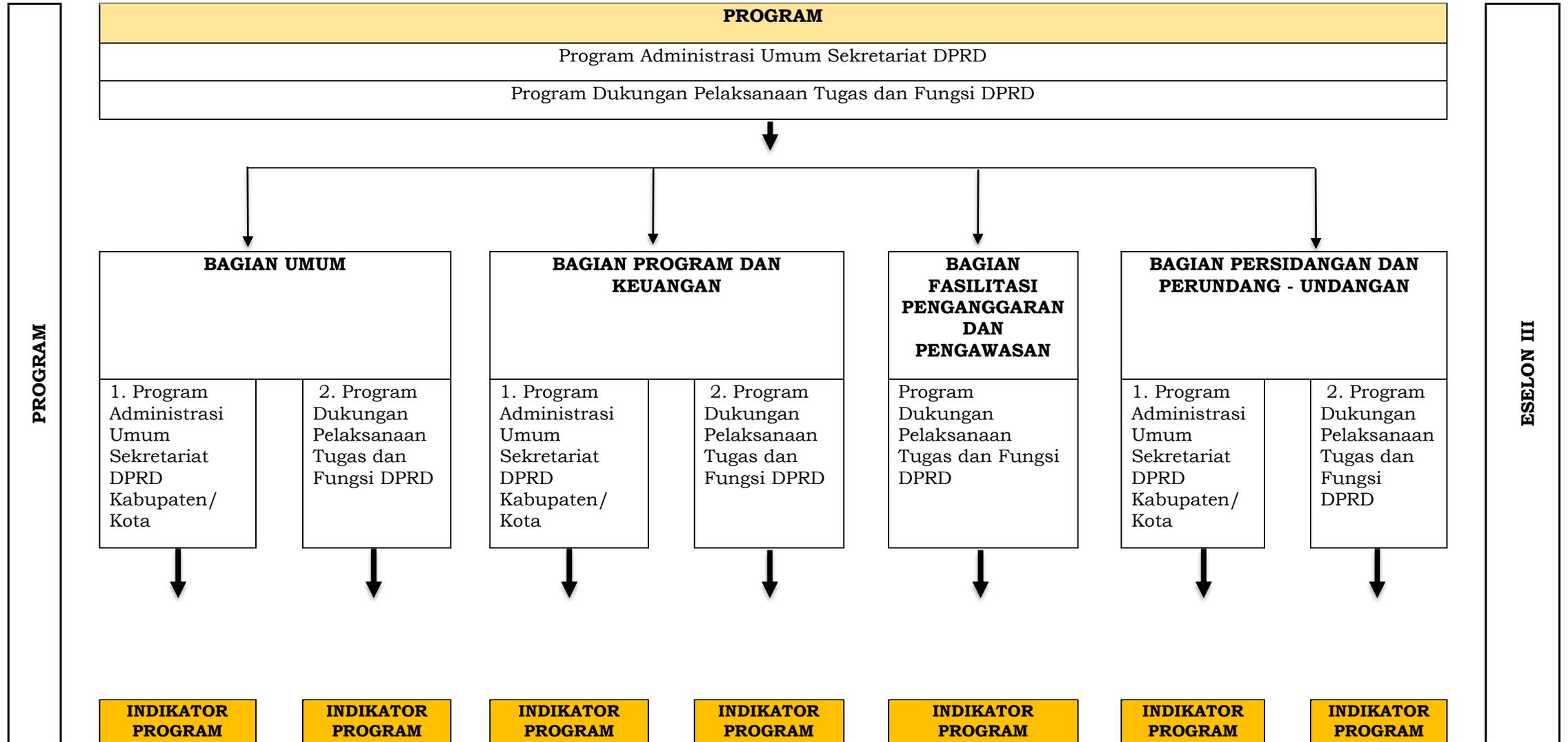
**POHON KINERJA/LOGICAL FRAMEWORK  
SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI TAHUN 2023**

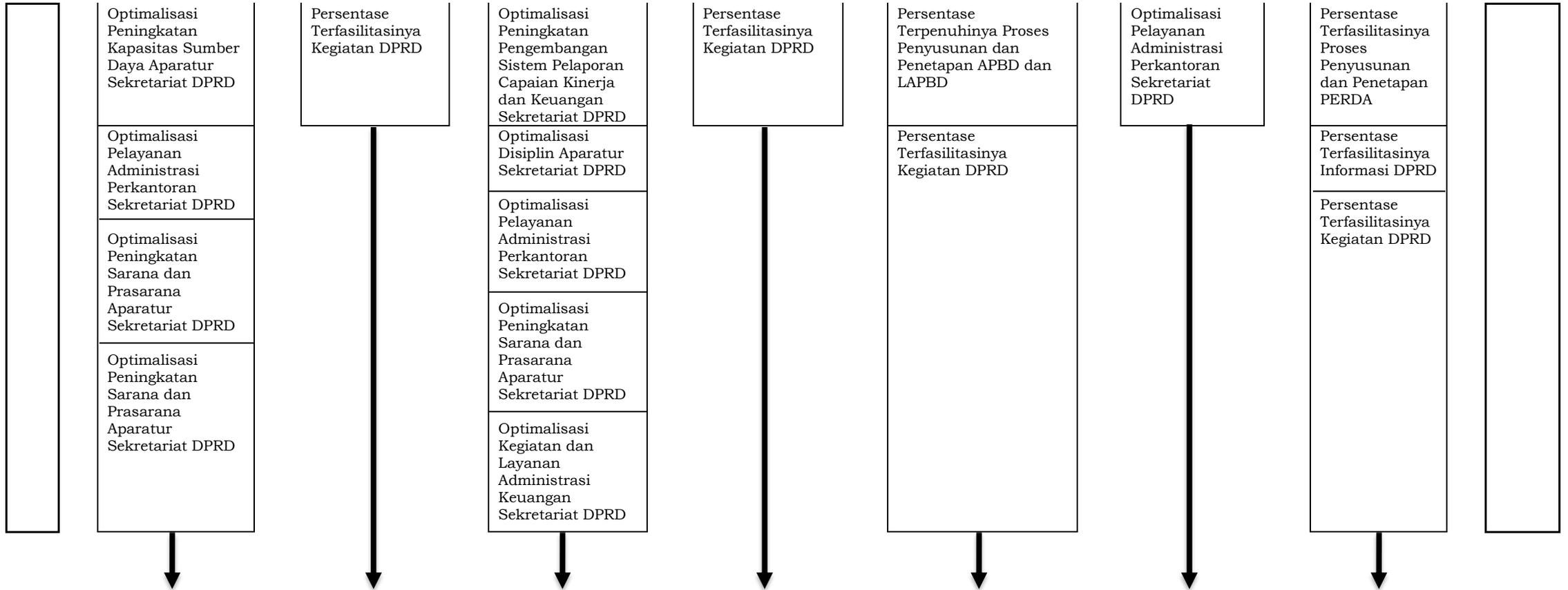
<b>RPJMD</b>	<b>VISI KOTA BEKASI</b>	<b>WALI KOTA</b>
	Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan	
	<b>MISI I KOTA BEKASI</b>	
	Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	
	<b>TUJUAN KOTA BEKASI</b>	
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Profesional Akuntabel	
	<b>INDIKATOR TUJUAN KOTA BEKASI</b>	
	Indeks Reformasi Birokrasi	
	<b>SASARAN KOTA BEKASI</b>	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	
	<b>INDIKATOR SASARAN KOTA BEKASI</b>	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	

RENSTRA

<b>TUJUAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI</b>	
Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan	
<b>INDIKATOR TUJUAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI</b>	
Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan DPRD	
<b>SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI</b>	
Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	
<b>INDIKATOR SASARAN DPRD KOTA BEKASI</b>	
Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	
Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	
Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	
Nilai AKIP Perangkat Daerah	

ESELON II





KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	<b>KEGIATAN</b>		<b>KEGIATAN</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>KEGIATAN</b>	ESELON IV
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kapasitas DPRD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kapasitas DPRD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendalaman Tugas DPRD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Pembahasan KUA dan PPAS	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Perda	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Program Kerja DPRD	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
	<b>KEGIATAN</b>		<b>KEGIATAN</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>KEGIATAN</b>		<b>KEGIATAN</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Daerah	Fasilitasi Tugas DPRD	Pembahasan APBD		Pembahasan Kerjasama Daerah	
	<b>SUB KEGIATAN</b>		<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>		<b>SUB KEGIATAN</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Pembahasan Laporan Semester		Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		<b>KEGIATAN</b>	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		<b>KEGIATAN</b>		Peningkatan Kapasitas DPRD		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				
<b>KEGIATAN</b>		<b>KEGIATAN</b>		<b>SUB KEGIATAN</b>		<b>SUB KEGIATAN</b>		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan		Publikasi dan Dokumentasi Dewan		

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
<b>SUB KEGIATAN</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
<b>KEGIATAN</b>
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
<b>SUB KEGIATAN</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
<b>KEGIATAN</b>
Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah

<b>SUB KEGIATAN</b>
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
<b>KEGIATAN</b>
Administrasi Umum Perangkat Daerah
<b>SUB KEGIATAN</b>
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>KEGIATAN</b>
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Hukum
Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur
Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat
Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Perekonomian
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Pengawasan Penggunaan Anggaran
<b>KEGIATAN</b>
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
<b>SUB KEGIATAN</b>
Kunjungan Kerja dalam Daerah

Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
<b>KEGIATAN</b>
Fasilitasi Tugas DPRD
<b>SUB KEGIATAN</b>
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

<b>SUB KEGIATAN</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/

<b>SUB KEGIATAN</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Pelaksanaan Reses

KEGIATAN/ SUB KEGIATAN

Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>KEGIATAN</b>
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
<b>SUB KEGIATAN</b>
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
<b>KEGIATAN</b>
Layanan Administrasi DPRD
<b>SUB KEGIATAN</b>
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

<b>KEGIATAN</b>
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
<b>SUB KEGIATAN</b>
Pengawasan Kode Etik DPRD

ESELON IV

### III.3. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun. Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah ke suatu titik terang pencapaian hasil.

Sesuai dengan tugas pokok Sekretariat DPRD dalam unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bekasi Tahun 2018-2023, yaitu Misi yang pertama “Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” dengan Tujuan “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel”, dan Sasaran dari Tujuan Misi I tersebut yaitu “Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah”.

Tahun 2019 Sekretariat DPRD Kota Bekasi telah melakukan Revisi Renstra Tahun 2020-2023 sebanyak 1 (satu) kali berdasarkan hasil evaluasi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dalam pemenuhan bahan penilaian SAKIP.

Selanjutnya perubahan dilakukan pada perubahan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan target sasaran strategis.

Tujuan : Meningkatkan pengelolaan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD secara efektif, efisien transparan dan akuntabel dalam menunjang harmonisasi kemitraan antara eksekutif dan legislatif.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis SKPD bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir tahun, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD maka Sasaran yang ingin dicapai.

Indikator Tujuan:

Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Indikator Sasaran:

1. Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD;
2. Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD seperti tergambar pada tabel 4.1.

### TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD 2018-2023

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan pengelolaan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD secara efektif, efisien transparan dan akuntabel dalam menunjang harmonisasi kemitraan antara eksekutif dan legislatif	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	1. Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	1. Indeks Kepuasan DPRD Terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	76,61	76,71	76,81	76,91	77
			2. Meningkatnya Harmonisasi Kemitraan antara eksekutif dan legislatif	2. Indeks Kepuasan Masyarakat	76,61	76,71	76,81	76,91	77
			3. Meningkatnya Profesionalisme Sekretariat DPRD	3. Prosentase Raperda Tepat Waktu	50	50	50.10	50.10	50.15

### TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD 2018-2023 (PERUBAHAN)

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan	Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan DPRD	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	-	-	75	75.10	75.20
				Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	-	-	75	75,1	75,2
				Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	-	-	75	75,1	75,2
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	-	77,4	77,5	77,6	

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

## SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018-2023

OPD : SEKRETARIAT DPRD

VISI : MISI KE- SATU

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	IKU	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
							2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya peningkatan pengelolaan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam menunjang harmonisasi kemitraan antara eksekutif dan legislatif	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Terepenuhinya dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	<p>Hasil Survey</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- U1 s.d U9 = Unsur Pelayanan</li> <li>- NNR = Nilai Rata-rata</li> <li>- IKM = Indeks Kepuasan Anggota DPRD</li> <li>- *) = Jumlah NRR IKM Tertimbang</li> <li>- **) = Jumlah NNR Tertimbang x 25</li> </ul> <p>NRR Per Unsur = <math>\frac{\text{Jumlah nilai per unsur}}{\text{Jumlah kuesioner yang terisi}}</math></p> <p>NRR = NRR per unsur x 0,011</p>	Indeks	76,6 1	76,7 1	76,8 1	76,9 1	77.00

		Meningkatnya akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perda yang disahkan Raperda yang diusulkan}}{\text{Jumlah Perda yang diusulkan}} \times 100\%$	Persen	50	50	50.10	50.10	50.15
		Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Hasil Survey</p> <p><b>Rumus Perhitungan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>U1 s.d U9 = Unsur Pelayanan</b></li> <li>- <b>NNR = Nilai Rata-rata</b></li> <li>- <b>IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat</b></li> <li>- <b>*) = Jumlah NRR IKM Tertimbang</b></li> <li>- <b>** ) = Jumlah NRR Tertimbang x 25</b></li> </ul> <p>NRR Per Unsur = <math>\frac{\text{Jumlah nilai per unsur}}{\text{Jumlah kuesioner yang terisi}}</math></p> <p>NRR = NRR per unsur x 0,011</p>	Indeks	76,61	76,71	76,81	76,91	77.00

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU PERUBAHAN)**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021-2023**

**OPD : SEKRETARIAT DPRD**

**VISI : MISI KE- SATU**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	IKU	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
							2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan	Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan DPRD	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	<u>Jumlah Perda yang disahkan</u> X 100% Raperda yang diusulkan	Persen (%)	50	50	75	75,10	75,20
				Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	<u>Perda dan Perkada APBD / LP2APBD yang disahkan</u> X 100% Perda dan Perkada APBD yang disahkan tepat waktu	Persen (%)	-	-	75	75,1	75,2
				Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	<u>LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah</u> X 100% LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah tepat waktu	Persen (%)	-	-	75	75,1	75,2

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

### IV.1. Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi yaitu dalam penyusunan perencanaan pembangunan, harus memastikan Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Bekasi terpilih periode Tahun 2018-2023 tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD), serta dijabarkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja), maka dilaksanakan program perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJMD Tahun 2021-2023 sampai dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi.

Di samping itu, untuk menjabarkan RPJMD ke dalam perencanaan pembangunan tahunan dilaksanakan kegiatan penyusunan RKPD Tahun 2021 dilaksanakan pada tahun anggaran 2022, dengan didukung kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi (RPJMD dan RKPD) dijabarkan dalam perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja).

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu.

Dengan demikian, pada tahun 2022 Sekretariat DPRD Kota Bekasi akan melaksanakan 2 (dua) program, yang terdiri dari 1 (satu) program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terdiri dari 16 (enam belas) kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) Sub Kegiatan.

Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang tertuang dalam Renstra Perubahan Tahun 2021-2023, yaitu:

## **I. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota**

1. Indikator Kinerja (Outcome) : Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Hasil : 100%.

### **a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

#### **1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Hasil : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

#### **2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja.

Hasil : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian.

Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

2. Indikator Kinerja (Outcome) : Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Hasil : 100%.

**b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah****1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.

Hasil : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.

Kelompok Sasaran : ASN, Sekretariat DPRD dan DPRD.

**2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Hasil : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Kelompok Sasaran : ASN, Sekretariat DPRD dan DPRD.

3. Indikator Kinerja (Outcome) : Optimalisasi Disiplin Aparatur.

Hasil : 100%.

**c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah****1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut bagi Aparatur Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Jumlah Pakaian Dinas, Olahraga dan Batik bagi Aparatur Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Hasil : Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan pada Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Kelompok Sasaran : Aparatur Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

## 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

Hasil : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Kelompok Sasaran : Aparatur Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

## 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Hasil : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Kelompok Sasaran : Aparatur Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

4. Indikator Kinerja (Outcome) : Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Hasil : 100%.

### d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

#### 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Hasil : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

**2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Hasil : Terlaksananya Kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

**3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.

Hasil : Tersedianya Bahan Logistik Kantor.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

**4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan.

Hasil : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

**5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan.

Hasil : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

**6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Hasil : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

**e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Hasil : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Kelompok Sasaran : Pemerintah Kota Bekasi dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

**2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.

Hasil : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Kelompok Sasaran : Pemerintah Kota Bekasi dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

**3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.

Hasil : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kelompok Sasaran : Pemerintah Kota Bekasi dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

5. Indikator Kinerja (Outcome) : Optimalisasi Disiplin Aparatur.

Hasil : 100%.

**f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya.

Hasil : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

**2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya.

Hasil : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

**3) Pemeliharaan Mebel**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Mebel yang Dipelihara.

Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan Mebel.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

**4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
 Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

**5) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.  
 Hasil : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya.  
 Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

**6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.  
 Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.  
 Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

6. Indikator Kinerja (Outcome) : Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD  
 Hasil : 100%.

**g. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**

**1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD.  
 Hasil : Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD.  
 Kelompok Sasaran : Anggota DPRD Kota Bekasi.

**2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan.  
 Hasil : Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD Kota Bekasi.

### **3) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD

Hasil : Terlaksananya Medical Check Up DPRD.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD Kota Bekasi.

7. Indikator Kinerja (Outcome) : Optimalisasi Disiplin Aparatur.

Hasil : 100%.

## **h. Layanan Administrasi DPRD**

### **4) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.

Hasil : Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD, Sekretariat DPRD, Pemerintah Kota Bekasi dan Tamu Undangan.

## **II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**

1. Indikator Kinerja (Outcome) : Persentase Terpenuhinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD.

Hasil : LHP-BPK, LP2APBD, KUA PPAS Murni, KUA PPAS, APBD Murni, APBD.

### **a. Pembahasan Kebijakan Anggaran**

#### **1) Pembahasan KUA dan PPAS**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS.

Hasil : Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS.

Kelompok Sasaran : Pimpinan dan Anggota Badan

Anggaran, Sekretariat DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD se Kota Bekasi.

## 2) Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

Hasil : Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

Kelompok Sasaran : Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran, Sekretariat DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD se Kota Bekasi.

## 3) Pembahasan APBD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD.

Hasil : Terlaksananya Pembahasan APBD.

Kelompok Sasaran : Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran, Sekretariat DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD se Kota Bekasi.

## 4) Pembahasan APBD Perubahan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan.

Hasil : Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan.

Kelompok Sasaran : Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran, Sekretariat DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD se Kota Bekasi.

## 5) Pembahasan Laporan Semester

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi

Hasil	: Pelaksanaan APBD Per Semester. : Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester.
Kelompok Sasaran	: Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran, Sekretariat DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD se Kota Bekasi.

#### **6) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD**

Indikator Keluaran (Output)	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.
Hasil	: Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.
Kelompok Sasaran	: Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran, Sekretariat DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD se Kota Bekasi.

2. Indikator Kinerja (Outcome) : Persentase Terasilinasinya Proses Penyusunan dan Penetapan PERDA.

Hasil	: Naskah Akademis dan Raperda Inisiatif, Propemperda Naskah Akademis dan Raperda Inisiatif, Kajian/Telaahan Naskah Akademis Dan Raperda Inisiatif, Rekomendasi dan Peraturan DPRD.
-------	--

#### **b. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**

##### **1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah**

Indikator Keluaran (Output)	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
Hasil	: Terlaksananya Penyusunan dan

Pembahasan Program  
Pembentukan Peraturan Daerah  
Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi, Masyarakat Kota Bekasi.

## 2) Pembahasan Rancangan Perda

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Hasil : Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi, Masyarakat Kota Bekasi.

## 3) Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan.

Hasil : Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi, Masyarakat Kota Bekasi.

## 4) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi.

Hasil : Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi, Masyarakat Kota Bekasi.

#### 5) **F Penyusunan Tata Tertib DPRD**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun.

Hasil : Tersusunnya Tata Tertib DPRD.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi, Masyarakat Kota Bekasi.

3. Indikator Kinerja (Outcome) : Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD.

Hasil : Terfasilitasinya Fungsi Pengawasan DPRD, Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah, Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Tersusunnya Agenda DPRD dan Kebijakan Pimpinan DPRD.

#### c. **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**

##### 1) **Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum.

Hasil : Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, OPD dan Masyarakat Kota Bekasi.

##### 2) **Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur.

Hasil : Terlaksananya Pengawasan  
Urusan Pemerintahan Bidang  
Infrastruktur.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Sekretariat  
DPRD Kota Bekasi, OPD dan  
Masyarakat Kota Bekasi.

### **3) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Pengawasan  
Urusan Pemerintahan Bidang  
Kesejahteraan Rakyat.

Hasil : Terlaksananya Pengawasan  
Urusan Pemerintahan Bidang  
Kesejahteraan Rakyat.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Sekretariat  
DPRD Kota Bekasi, OPD dan  
Masyarakat Kota Bekasi.

### **4) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Hasil  
Pengawasan Urusan  
Pemerintahan Bidang  
Perekonomian.

Hasil : Terlaksananya Pengawasan  
Urusan Pemerintahan Bidang  
Perekonomian.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Sekretariat  
DPRD Kota Bekasi, OPD dan  
Masyarakat Kota Bekasi.

### **5) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Hasil  
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil  
Pemeriksaan Laporan Keuangan  
oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Hasil : Terlaksananya Pengawasan  
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Laporan Keuangan oleh Badan  
Pemeriksa Keuangan.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Sekretariat  
DPRD Kota Bekasi, OPD dan  
Masyarakat Kota Bekasi.

#### **6) Pengawasan Penggunaan Anggaran**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Hasil  
Pengawasan Penggunaan  
Anggaran.

Hasil : Terlaksananya Pengawasan  
Penggunaan Anggaran.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Sekretariat  
DPRD Kota Bekasi, OPD dan  
Masyarakat Kota Bekasi.

#### **7) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Rekomendasi Hasil  
Pembahasan Laporan Keterangan  
Pertanggungjawaban Kepala  
Daerah.

Hasil : Terlaksananya Pembahasan  
Laporan Keterangan  
Pertanggungjawaban Kepala  
Daerah.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Sekretariat  
DPRD Kota Bekasi, OPD dan  
Masyarakat Kota Bekasi.

### **d. Peningkatan Kapasitas DPRD**

#### **1) Pendalaman Tugas DPRD**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Hasil  
Pendalaman Tugas DPRD.

Hasil : Terlaksananya Pendalaman  
Tugas DPRD.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Sekretariat  
DPRD Kota Bekasi, Masyarakat  
Kota Bekasi.

**2) Publikasi dan Dokumentasi Dewan**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen  
Penyebarluasan Produk Hukum  
Daerah, Publikasi dan  
Dokumentasi Dewan.

Hasil : Terlaksananya Penyebarluasan  
Produk Hukum Daerah, Publikasi  
dan Dokumentasi Dewan.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Sekretariat  
DPRD Kota Bekasi, Masyarakat  
Kota Bekasi.

**3) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Orang dalam Kelompok  
Pakar dan Tim Ahli.

Hasil : Tersedianya Kelompok Pakar dan  
Tim Ahli.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Sekretariat  
DPRD Kota Bekasi, Masyarakat  
Kota Bekasi.

**4) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi**

Indikator Keluaran (Output) : Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi.

Hasil : Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Sekretariat  
DPRD Kota Bekasi, Masyarakat  
Kota Bekasi.

**5) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Hasil  
Penyelenggaraan Hubungan  
Masyarakat.

Hasil : Terselenggaranya Hubungan  
Masyarakat.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Sekretariat  
DPRD Kota Bekasi, Masyarakat  
Kota Bekasi.

**6) Penyusun Program Kerja DPRD**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Rencana Kerja

	DPRD.
Hasil	: Tersusunnya Rencana Kerja DPRD.
Kelompok Sasaran	: DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Masyarakat Kota Bekasi.

#### e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

##### 1) Kunjungan Kerja dalam Daerah

Indikator Keluaran (Output)	: Jumlah Kegiatan Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat.
Hasil	: Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD.
Kelompok Sasaran	: Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD serta Masyarakat Kota Bekasi.

##### 2) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Indikator Keluaran (Output)	: Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun.
Hasil	: Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
Kelompok Sasaran	: Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD serta Masyarakat Kota Bekasi.

##### 3) Pelaksanaan Reses

Indikator Keluaran (Output)	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses.
Hasil	: Terlaksananya Reses.
Kelompok Sasaran	: Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD serta Masyarakat Kota Bekasi.

#### f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

##### 1) Pengawasan Kode Etik DPRD

Indikator Keluaran (Output)	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD.
-----------------------------	---

Hasil	: Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD.
Kelompok Sasaran	: DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD.

#### **g. Fasilitasi Tugas DPRD**

##### **1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD**

Indikator Keluaran (Output)	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
Hasil	: Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
Kelompok Sasaran	: Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

##### **2) Penyusunan Laporan Kinerja DPRD**

Indikator Keluaran (Output)	: Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun.
Hasil	: Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD.
Kelompok Sasaran	: Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

##### **3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah**

Indikator Keluaran (Output)	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah.
Hasil	: Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah.
Kelompok Sasaran	: Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

##### **4) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**

Indikator Keluaran (Output)	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.
Hasil	: Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.
Kelompok Sasaran	: Anggota DPRD dan Sekretariat

DPRD Kota Bekasi.

#### **h. Persentase Terfasilitasinya Informasi DPRD**

Indikator Kinerja (Outcome) : Persentase Terfasilitasinya Informasi DPRD.

Hasil : Terpublikasi dan Terfasilitasi Kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD.

#### **1) Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun.

Hasil : Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi.

Kelompok Sasaran : DPRD, Masyarakat Kota Bekasi dan Media Massa.

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI  
TAHUN 2021-2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an				Tolok Ukur	Target				
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	2	SEKRETARIAT DPRD							201,975,374,890				257,065,440,968				
4	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							92,011,379,930				115,780,608,218			
4	2	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							245,815,000				368,000,000		
4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Optimalisasi Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	0 Dokumen	100 %	40,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Optimalisasi Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD	100 %	50,000,000

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25 Dokumen						
4	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	3 Dokumen	100 %	205,815,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD	100 %	318,000,000
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							<b>11,365,790,000</b>				<b>14,313,037,906</b>	
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Pelayanan Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	55 Orang/ Bulan	100 %	11,128,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Presentase Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %	13,910,875,000



4	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya Penyelenggaraan Kegiatan Pada Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Orang	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	200,000,000
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu		28 Orang						
4	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya Penyelenggaraan Kegiatan Pada Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	49 Orang	100 %	520,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	580,000,000
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>5,502,329,562</b>				<b>6,772,132,812</b>	

4	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	3103 Unit	100 %	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100,000,000
4	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	4 Paket	100 %	2,637,763,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3,467,453,750
4	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	4 Paket	100 %	429,116,562	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	429,116,562
4	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	65600 Eks emplar	100 %	580,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	685,000,000

4	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	1 Paket	100 %	1,152,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1,440,562,500
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	1 Paket	100 %	628,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	650,000,000
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>1,300,000,000</b>				<b>1,500,000,000</b>	
4	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	343 Unit	100 %	1,300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,500,000,000
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>6,741,178,804</b>				<b>2,350,000,000</b>	

4	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	845 Laporan	100 %	50,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,000,000,000
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan							
4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	4 Paket	100 %	950,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,000,000,000
4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	1224 Orang/Tahun	100 %	5,741,178,804	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	350,000,000
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>7,628,316,564</b>			<b>8,562,500,000</b>			

4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	4 Unit	100 %	300,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	375,000,000
4	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	31 Unit	100 %	550,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	687,500,000
4	2	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	1 Paket	100 %	100,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	125,000,000

4	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	10 Paket	100 %	300,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	375,000,000
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	24757 Meter Persegi	100 %	6,378,316,564	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7,000,000,000
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2.15</b>		<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>							<b>57,857,950,000</b>				<b>79,697,437,500</b>	
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	600 Orang/Tahun	100 %	57,007,950,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	78,759,937,500

4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	150 Stel	100 %	700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	750,000,000
4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	50 Orang	100 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	187,500,000
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2.16</b>		<b>Layanan Administrasi DPRD</b>							<b>750,000,000</b>				<b>937,500,000</b>	
4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terpenuhinya Layanan Administrasi DPRD	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	1 Tahun	100 %	750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Layanan Administrasi DPRD	100 %	937,500,000
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>							<b>109,963,994,960</b>				<b>141,284,832,750</b>	
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2.01</b>		<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>							<b>19,200,000,000</b>				<b>24,000,000,000</b>	
4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan	Tersusunnya Propemperda, Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif dan Peraturan Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	2 Dokumen Propemp erda	100 %	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	100 %	1,250,000,000

							Daerah											
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Tersusunnya Propemperda, Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif dan Peraturan Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	17 Dokumen Raperda	100 %	8,750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	100 %	10,937,500,000	
4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Tersusunnya Propemperda, Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif dan Peraturan Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	6 Dokumen Kajian	100 %	3,250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	100 %	4,062,500,000	
4	2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Tersusunnya Propemperda, Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif dan Peraturan Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	10 Dokumen NA	100 %	5,750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	100 %	7,187,500,000	

4	2	2	2.01	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Tersusunnya Propemperda, Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif dan Peraturan Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	1 Dokumen Tatib DPRD	100 %	450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	100 %	562,500,000
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2.02</b>		<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>							<b>6,300,000,000</b>				<b>7,875,000,000</b>	
4	2	2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Fungsi Budgeting DPRD dalam Pengelolaan APBD	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	6 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1,050,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen	1,312,500,000
4	2	2	2.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Fungsi Budgeting DPRD dalam Pengelolaan APBD	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	6 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1,050,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen	1,312,500,000
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Terlaksananya Fungsi Budgeting DPRD dalam Pengelolaan APBD	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	6 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1,050,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen	1,312,500,000

4	2	2	2.02	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Fungsi Budgeting DPRD dalam Pengelolaan APBD	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	6 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1,050,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen	1,312,500,000
4	2	2	2.02	5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Terlaksananya Fungsi Budgeting DPRD dalam Pengelolaan APBD	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	6 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1,050,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen	1,312,500,000
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester										
4	2	2	2.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Fungsi Budgeting DPRD dalam Pengelolaan APBD	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	6 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1,050,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen	1,312,500,000
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>							<b>26,864,096,960</b>				<b>32,134,485,000</b>	

4	2	2	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyeklenggaran Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Semua Kelurahan	12 Dok umen	12 Lapora n	100 %	4,689,127,240	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyeklenggaran Pemerintahan	12 D oku men	5,500,000,000	
						Jumlah Dokumen Pengawasan Penyeklenggaran Pemerintahan				7 Doku men						Jumlah Dokumen Pengawasan Penyeklenggaran Pemerintahan		7 Do kum en
						Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggara an Pemerintahan				7 Doku men						Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggara an Pemerintahan		7 Do kum en
						Jumlah Dokumen Penyelenggara an Pengawasan Pemerintahan				12 Dok umen						Jumlah Dokumen Penyelenggara an Pengawasan Pemerintahan		12 D oku men

4	2	2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyeklenggaran Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	12 Dok umen	12 Lapora n	100 %	4,689,127,240	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyeklenggaran Pemerintahan	12 D oku men	5,500,000,000
						Jumlah Dokumen Pengawasan Penyeklenggaran Pemerintahan				7 Doku men					Jumlah Dokumen Pengawasan Penyeklenggaran Pemerintahan	7 Do kum en	
						Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				7 Doku men					Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	7 Do kum en	
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan				12 Dok umen					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan	12 D oku men	

4	2	2	2.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyeklenggaran Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	12 Dok umen	12 Lapora n	100 %	4,689,127,240	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyeklenggaran Pemerintahan	12 D oku men	5,500,000,000
						Jumlah Dokumen Pengawasan Penyeklenggaran Pemerintahan				7 Doku men				Jumlah Dokumen Pengawasan Penyeklenggaran Pemerintahan	7 Do kum en		
						Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggara an Pemerintahan				7 Doku men				Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggara an Pemerintahan	7 Do kum en		
						Jumlah Dokumen Penyelenggara an Pengawasan Pemerintahan				12 Dok umen				Jumlah Dokumen Penyelenggara an Pengawasan Pemerintahan	12 D oku men		

4	2	2	2.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyeklenggaran Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	12 Dok umen	12 Lapora n	100 %	4,689,127,240	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyeklenggaran Pemerintahan	12 D oku men	5,500,000,000
						Jumlah Dokumen Pengawasan Penyeklenggaran Pemerintahan				7 Doku men					Jumlah Dokumen Pengawasan Penyeklenggaran Pemerintahan	7 Do kum en	
						Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggara an Pemerintahan				7 Doku men					Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggara an Pemerintahan	7 Do kum en	
						Jumlah Dokumen Penyelenggara an Pengawasan Pemerintahan				12 Dok umen					Jumlah Dokumen Penyelenggara an Pengawasan Pemerintahan	12 D oku men	

4	2	2	2.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	12 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1,500,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	12 Dokumen	1,875,750,000
						Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				7 Dokumen				Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	7 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				7 Dokumen				Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	7 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan				12 Dokumen				Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan	12 Dokumen		

4	2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyeklenggaran Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	12 Dokumen	1 Dokumen	100 %	4,150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyeklenggaran Pemerintahan	12 Dokumen	5,187,500,000
						Jumlah Dokumen Pengawasan Penyeklenggaran Pemerintahan				7 Dokumen					Jumlah Dokumen Pengawasan Penyeklenggaran Pemerintahan	7 Dokumen	
						Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				7 Dokumen					Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	7 Dokumen	
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan				12 Dokumen					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan	12 Dokumen	

4	2	2	2.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	12 Dokumen	1 Dokumen	100 %	2,456,988,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	12 Dokumen	3,071,235,000
						Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				7 Dokumen					Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	7 Dokumen	
						Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				7 Dokumen					Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	7 Dokumen	
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan				12 Dokumen					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan	12 Dokumen	
4	2	2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD							22,860,900,000		29,695,252,500			

4	2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Advetorial Adhikarya Parleментарia	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas DPRD Kota Bekasi	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	1 Kali	575 Orang/Kegiatan	100 %	8,200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Advetorial Adhikarya Parleментарia	1 Kali	10,250,000,000
						Jumlah Baliho				6 Kegiatan				Jumlah Baliho	6 Kegiatan		
						Jumlah Coffe Morning				1 Tahun				Jumlah Coffe Morning	1 Tahun		
						Jumlah Karangan Bunga				1 Tahun				Jumlah Karangan Bunga	1 Tahun		
						Jumlah Majalah				1 Tahun				Jumlah Majalah	1 Tahun		
						Jumlah Media Gathering				1 Kali				Jumlah Media Gathering	1 Kali		
						Jumlah Peliputan				1880 Eksemplar				Jumlah Peliputan	1880 Eksemplar		
						Kerjasama Media Cetak dan Online				300 Buah				Kerjasama Media Cetak dan Online	300 Buah		
						Persentase Terfasilitasinya Informasi DPRD				100 %				Persentase Terfasilitasinya Informasi DPRD	100 %		



					1 Tahun							Jumlah Coffe Morning	1 Tahun
					1 Tahun							Jumlah Karangan Bunga	1 Tahun
					1 Tahun							Jumlah Majalah	1 Tahun
					1 Kali							Jumlah Media Gathering	1 Kali
					1880 Eksemplar							Jumlah Peliputan	1880 Eksemplar
					300 Buah							Kerjasama Media Cetak dan Online	300 Buah
					100 %							Persentase Terfasilitasinya Informasi DPRD	100 %
					100 %							Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD	100 %



					1 Kali							Jumlah Media Gathering	1 Kali
					1880 Eksemplar							Jumlah Peliputan	1880 Eksemplar
					300 Buah							Kerjasama Media Cetak dan Online	300 Buah
					100 %							Persentase Terfasilitasinya Informasi DPRD	100 %
					100 %							Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD	100 %
					100 %							Persentase Terfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan PERDA	100 %





										(PAD)			
												Jumlah Baliho	6 Kegiatan
												Jumlah Coffe Morning	1 Tahun
												Jumlah Karangan Bunga	1 Tahun
												Jumlah Majalah	1 Tahun
												Jumlah Media Gathering	1 Kali
												Jumlah Peliputan	1880 Eksemplar
												Kerjasama Media Cetak dan Online	300 Buah
												Persentase Terfasilitasinya Informasi DPRD	100 %



4	2	2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Terlaksananya Jaring Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	9 Dokumen	3 Dokumen	100 %	1,225,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	9 Dokumen	1,450,000,000
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Jaring Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	9 Dokumen	3 Dokumen	100 %	10,816,825,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	9 Dokumen	13,521,031,250
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2.06</b>		<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>							<b>3,089,068,000</b>				<b>3,380,490,000</b>	
4	2	2	2.06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Terasilitasinya kegiatan DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	12 Laporan	100 %	3,089,068,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Terasilitasinya kegiatan DPRD	100 %	3,380,490,000
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2.08</b>		<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>							<b>19,202,130,000</b>				<b>24,291,074,000</b>	
4	2	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terpenuhinya Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	4 Dokumen	0 Dokumen	100 %	8,245,820,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD	4 Dokumen	9,894,984,000



<b>TOTAL</b>	<b>201,975,374,890</b>	<b>257,065,440,968</b>
--------------	------------------------	------------------------

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021			
						TARGET	RP (RIBUAN)		
1	2	3	4	5	6	7	8	15	16

Meningkatkan Fasilitas Kegiatan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	4	02	01		Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota	Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD					
		4	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
		4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 Sekretariat DPRD,Evaluasi Renja DPRD Tahun 2022,Dokumen Renja DPRD,Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat,Dokumen Laporan Evaluasi Capaian Kinerja,Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD,Dokumen Renstra 2018-2023,Sinergitas DPRD dengan OPD	23 Dokumen	500,000.00	Bagian Program dan Keuangan	
		4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	40,000.00	Bagian Program dan Keuangan	
		4	02	01				Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD				
		4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Daerah					

		4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns		720 Orang/ Bulan	12,509,864.00	Bagian Program dan Keuangan		
								Jumlah Orang Gaji dan Tunjangan ASN						
		4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan DPRD		2 Dokumen	10,000.00	Bagian Program dan Keuangan		
		4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan SKPD dan DPRD		24 Dokumen	10,000.00	Bagian Program dan Keuangan		
								Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan DPRD		4 Dokumen				
								Jumlah Laporan Keuangan Triwulanan SKPD dan DPRD		8 Dokumen				
		4	02	01				Optimalisasi Disiplin Aparatur Sekretariat DPRD						
		4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
		4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut bagi Aparatur Sekretariat DPRD Kota Bekasi		239 set	700,000.00	Bagian Program dan Keuangan		
								Jumlah Pakaian Dinas, Olah Raga dan Batik bagi Aparatur Sekretariat DPRD Kota Bekasi		691 Stel/buah				
4	02	01				Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD								
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									

		4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan		59 Orang	500,000.00	Bagian Umum	
		4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Workshop Nasional, Munas, Rakernas, Rakornas Sekretariat DPRD, Workshop Nasional		63 Orang	736,665.00	Bagian Umum	
		4	02	01				Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD					
		4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						
		4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		2383 Unit	50,000.00	Bagian Umum	
		4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		55 Unit	3,545,000.00	Bagian Umum	
		4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor		0	0.00	Bagian Umum	
		4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer		4491 Unit, 84158 Pak	3,732,243.00	Bagian Umum	
							Jumlah Makanan dan Minuman Pimpinan, Makanan dan Minuman Harian Pegawai dan Pengamanan Unras						
		4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Jumlah Penggandaan/ Penjilidan		4952 Unit 236968 Lembar	500,000.00	Bagian Umum	

		4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		26200 Buku/ Eksemplar	580,000.00	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	
		4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum kunjungan tamu dari luar daerah		0	0.00	Bagian Umum	
		4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Frekuensi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah/ Perjalanan Dinas		14 Kali	1,864,550.00	Bagian Program dan Keuangan	
		4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan Minum Rapat-rapat Kegiatan Pansus, Komisi, AKD dan Rapat Sekretariat DPRD dengan SKPD		0	0.00	Bagian Program dan Keuangan	
		4	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Digitalisasi Arsip		0	0.00	Bagian Program dan Keuangan	
		4	02	01				Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD					
		4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
		4	02	01	2.07	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan laptop, PC Komputer All In One, Printer, AC Tablet, Drone dan Kamera		0	0.00	Bagian Umum	

		4	02	01			Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD					
		4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
		4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen surat terkirim		1002 Surat/ Paket	50,000.00	Bagian Umum
		4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemeliharaan Jaringan Telepon, dan Internet		143 Unit	750,000.00	Bagian Umum
								Jumlah Rekening Telepon, Air dan Listrik		192 Rekening/Bulan		
		4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Retribusi Jasa Kebersihan Kantor		1248 Orang/ Bulan	5,575,248.00	Bagian Program dan Keuangan
								Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran				
		4	02	01			Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD					
		4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
		4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan		4 Unit	300,000.00	Bagian Umum

		4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional		37 Unit	550,000.00	Bagian Umum	
		4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubelair		250 Unit	200,000.00	Bagian Umum	
		4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara		211 Unit	500,000.00	Bagian Umum	
		4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Gedung Kantor yang dipelihara		24757 M2	4,200,000.00	Bagian Umum	
		4	02	02				Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD					
		4	02	02	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						
		4	02	02	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Pembayaran Gaji, Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi			45,007,950.00	Bagian Program dan Keuangan	
		4	02	02	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas Anggota DPRD			700,000.00	Bagian Program dan Keuangan	

		4	02	02	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD			150,000.00	Bagian Program dan Keuangan	
		4	02	02	2.16		Layanan Administrasi DPRD						
		4	02	02	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat-rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi, HUT Kota Bekasi dan HUT RI		22 Kali	1,100,000.00	Bagian Program dan Keuangan	
		4	02	02	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			0.00	Bagian Program dan Keuangan	
		4	02	02			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Terasilinasinya Proses Penyusunan dan Penetapan PERDA				SEKRETARIAT DPRD	
		4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						
		4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda Inisiatif, Propemperda dan Kajian Produk Hukum		14 Produk Hukum	6,277,520.00	Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan	
		4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda Inisiatif, Propemperda dan Kajian Produk Hukum		15 Raperda	8,700,000.00	Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan	

		4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Kajian Perundang-undangan		0	0.00	Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan
		4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif dan Naskah Akademik		0	0.00	Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan
		4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Tata Tertib DPRD		0	0.00	Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan
		4	02	02				Persentase Terpenuhinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD				SEKRETARIAT DPRD
		4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran					
		4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS APBD		1 Dokumen	1,040,000.00	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

		4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan		1 Dokumen	1,040,000.00	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	
		4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen APBD Murni		1 Dokumen	1,040,000.00	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	
		4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen APBD Perubahan		1 Dokumen	1,040,000.00	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	
		4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen LRA Semester I dan Prognosis APBD sampai Akhir Tahun		1 Dokumen	1,040,000.00	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	
		4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Perda LP2APBD		1 Dokumen	1,040,000.00	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	
		4	02	02				Persentase Terasilitasinya Kegiatan DPRD				SEKRETARIAT DPRD	
		4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						

		4	02	02	2.03	01	Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		7 Dokumen	2,590,515.80	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	
		4	02	02	2.03	02	Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		7 Dokumen	2,265,746.05	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	
		4	02	02	2.03	03	Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		7 Dokumen	2,469,746.05	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	
		4	02	02	2.03	04	Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		7 Dokumen	2,106,836.05	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	
		4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Rekomendasi DPRD atas Tindaklanjut LHP BPK		1 Dokumen	1,200,000.00	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	
		4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Rekomendasi DPRD atas Kebijakan Anggaran DPRD		1 Dokumen	2,200,000.00	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	

		4	02	02	2.08	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi LKPJ Kepala Daerah		1 Dokumen		Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
		4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD			-	-	
		4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Peserta Bimtek/Workshop/Raker/Seminar		300 Orang	6,604,035.00	Bagian Umum
								Jumlah Peserta Workshop Nasional, Munas, Rakernas				
		4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Buku Peraturan DPRD, Jumlah Buku Tatib DPRD, Jumlah Buku Kode Etik DPRD, Jumlah Buku Tata Hukum Beracara DPRD		200 Buku	50,000.00	Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan
		4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kajian/Telaahan Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD		18 Kali/ Kajian	2,500,000.00	Bagian Program dan Keuangan
		4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Kajian/Telaahan Tenaga Ahli Fraksi		0	(digabung)	Bagian Program dan Keuangan
		4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Sosialisasi 4 Pilar, Jumlah Media Gathering		8 Kali	20,500,000.00	Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan
								Jumlah Coffee Morning, Jumlah Sosialisasi melalui Adventorial Cetak dan Online				

		4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Hasil Pembahasan Agenda Renja DPRD dan Evaluasi Renja DPRD		1 Dokumen	1,300,000.00	Bagian Program dan Keuangan	
		4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						
		4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat		1 Dokumen	500,000.00	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	
		4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD		1 Dokumen	1,000,000.00	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	
		4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Laporan Reses DPRD		1 Dokumen	8,650,000.00	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	
		4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						
		4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pengawasan Kode Etik DPRD		1 Dokumen	1,000,170.00	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	

		4	02	02			Persentase Terfasilitasinya Informasi DPRD					SEKRETARIAT DPRD	
		4	02	02	2.07		Pembahasan Kerjasama Daerah			-	-		
		4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Baliho		30 Unit Baliho, 4000 eksemplar, 50 kali, 7 unit, 950 unit, 68 kali	4,000,000.00	Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan	
						Jumlah Majalah							
						Jumlah Peliputan							
						Jumlah Souvenir							
						Kerjasama Media Cetak							
						Kerjasama Media Elektronik							
		4	02	02			Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD					SEKRETARIAT DPRD	
		4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD			-	-	Bagian Program dan Keuangan	
		4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD ke Luar Daerah dan Luar Negeri		23 Kali	8,425,613.05	Bagian Program dan Keuangan	
		4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja DPRD		0	0.00	Bagian Program dan Keuangan	

		4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Rapat Pimpinan Badan Musyawarah dan Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi, Paripurna HUT RI serta Paripurna HUT Kota Bekasi		70 Kali	5,000,000.00	Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan	
		4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Kegiatan Pimpinan DPRD		0	0.00	Bagian Program dan Keuangan	
											<b>177,941,702,000.00</b>		

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahun 2023 yang juga merupakan dokumen operasionalisasi atau penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra tersebut merupakan tindaklanjut dari adanya perubahan RPJMD Kota Bekasi di Tahun 2021.

Terdapat beberapa hal yang mendasari adanya perubahan terhadap RPJMD Kota Bekasi beberapa salah satunya adalah implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah, penurunan penerimaan daerah, dan peningkatan belanja daerah dan pembiayaan sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah daerah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian daerah. Rencana penanganan, penyelamatan kesehatan dan perekonomian daerah tersebut tetap harus sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan harus direspon dengan perubahan yang mendasar, salah satunya dengan melakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Selain itu menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, membawa dampak adanya standarisasi penamaan, pemberian kode, pengelompokan informasi menuju single codebase yang bertujuan menjadikan tata kelola pemerintah daerah semakin transparan, akuntabel, responsible, serta reliable sesuai dengan prinsip-prinsip good governance serta Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi berdampak langsung untuk melakukan perubahan terhadap Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Proses penyusunan RENJA ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi lembaga untuk melaksanakan program dan kegiatan indikatif yang terdapat dalam RENJA secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan.

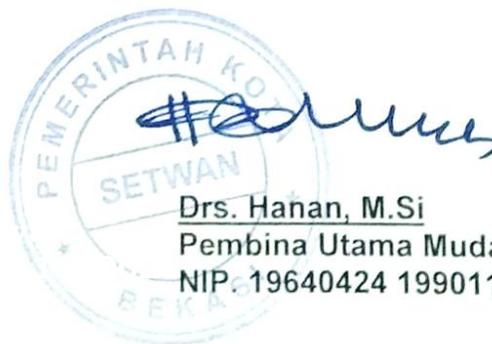
Adapun kaidah pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi;
2. Seluruh komponen bagian, sub bagian pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi, agar menyempurnakan Program dan Kegiatan dalam RENJA Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya;
3. Program-program yang tercantum dalam RENJA Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023, diupayakan untuk dilaksanakan seluruhnya dengan memperhatikan prioritas pembangunan serta ketersediaan anggaran;
4. RENJA Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
5. Agar RENJA Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap komponen Sekretariat DPRD Kota Bekasi diharapkan mengupayakan penguatan peran stakeholder dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target-target RENJA Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023, baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Instansi terkait maupun masyarakat luas;

6. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023, sebagai berikut:
- a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing bagian;
  - b. Sekretaris DPRD Kota Bekasi Kota Bekasi menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
  - c. Kepala Bagian melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RENJA bagian periode sebelumnya;
  - d. Sekretaris DPRD Kota Bekasi menyusun evaluasi RENJA berdasarkan hasil evaluasi bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
  - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan Renja untuk periode berikutnya;
  - f. Apabila terjadi perubahan kebijakan daerah maupun kebijakan nasional selama tahun 2023, Sekretariat DPRD Kota Bekasi akan melakukan perubahan-perubahan demi kesempurnaan Rencana Kerja Perubahan ini.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal

SEKRETARIS DPRD KOTA BEKASI



Drs. Hahan, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640424 199011 1 002